

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

HUBUNGI KAMI:



inspektorat.bkn@gmail.com
inspektorat@bkn.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi... ..	2
1.3. Permasalahan Utama	6
BAB. II. PERENCANAAN KERJA	8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
2.2. Visi Badan Kepegawaian Negara	8
2.3. Misi Badan Kepegawaian Negara	8
2.4. Sasaran Strategis Pengawasan	9
2.5. Tujuan Strategis	10
2.6. Perjanjian Kinerja 2023	10
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Sasaran Kinerja Organisasi	15
3.2. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima	18
IKU.1 Level Maturitas SPIP	18
IKU.2 Level Kapabilitas APIP (IA – CM)	20
3.3. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama	23
IKU.3 Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	24
3.4. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel	31
IKU.4 Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	31
IKU.5 Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	32
IKU.6 Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan	33
IKU.7 Persentase Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	38
3.5. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang Kompeten	43
IKU.8 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	43

3.6.	Sasaran Strategis 5: Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Sestama BKN yang handal dan mudah diakses	47
	IKU.9 Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat	47
3.7.	Sasaran Strategis 6: Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	49
	IKU.10 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN	49
	IKU.11 Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN	57
3.8.	Sasaran Strategis 7: Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama BKN secara efisien dan akuntabel	61
	IKU.12 Nilai Realisasi Kinerja Anggaran Inspektorat	61
	IKU.13 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	64
BAB. IV. PENUTUP		65
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Rekomendasi/Masukan	66
DAFTAR LAMPIRAN		68

DAFTAR TABEL

1	Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN Per Desember 2023 Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan	4
2	Kondisi dan Kebutuhan Sumber Daya di Inspektorat Berdasarkan Peta Jabatan pada Kepka BKN Nomor 150.1 Tahun 2022	5
3	Kompetensi ASN Inspektorat berdasarkan tingkat Pendidikan Formal	6
4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	11
5	Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023	12
6	Capaian Sasaran Kinerja 2023	15
7	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN	19
8	Perbandingan Level Maturitas SPIP dengan Renstra	20
9	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023	21
10	Perkembangan Kapabilitas APIP 2019-2023	22
11	Nilai rata-rata Sub Unsur Tahun 2023	25
12	Konversi Nilai IKM Inspektorat	28
13	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat tahun 2023	29
14	Perbandingan Target dan Realisasi Penyusunan Pedoman di Inspektorat tahun 2020-2023	32
15	Data Pengaduan kepada Inspektorat Tahun 2020 s.d 2023	33
16	Data LHA, LHR, dan LHE Inspektorat Tahun 2020 s.d 2023	38
17	Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2023	39
18	Nilai IP ASN Lingkup Sekretariat Utama	44

19	Pegawai Inspektorat yang mengikuti Pengembangan Diri	45
20	Perkembangan IP ASN Inspektorat 2021-2023	46
21	Pemanfaatan Sistem Informasi pada Inspektorat Tahun 2020-2023	48
22	Rincian Gratifikasi Tahun 2023	50
23	Rincian Laporan Benturan Kepentingan Tahun 2023	53
24	Target dan Realisasi Bulanan Anggaran Inspektorat	61
25	Realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2023	62
26	Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023	63
27	Tindak lanjut temuan Tahun 2021-2023	64

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Inspektorat BKN	3
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dengan Narasumber dari BPKP	19
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Manajemen Risiko	23
4	Kegiatan Sosialisasi pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan BKN	31
5	Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	47
6	Kegiatan Sosialisasi Gratifikasi	51
7	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	52
8	Video bahan Sosialisasi Benturan Kepentingan	55
9	Kegiatan Bimbingan Teknis Zona Integritas	56
10	Rapat Koordinasi Manajemen Risiko	57

DAFTAR GRAFIK

1	Persentase Sumber Daya Manusia Tahun 2023 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	4
2	Persentase Sumber Daya Manusia Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin	5
3	Nilai Unsur 1-9 pada IKM Inspektorat 2023	28
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Inspektorat Tahun 2020 – 2023	29
5	Nilai IP ASN Lingkup Sekretariat Utama	44
6	Tindak lanjut temuan Tahun 2021-2023	63

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2023 adalah suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Inspektorat BKN. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, kendala dalam pencapaian target kinerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BKN Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja Inspektorat pada tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Inspektorat kedepannya.

Jakarta, 12 Januari 2024
Inspektur,

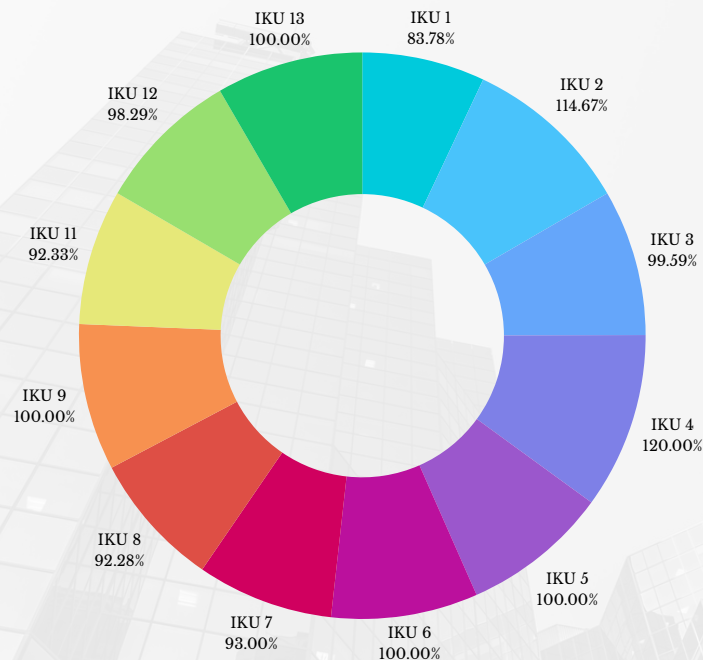
±

RINGKASAN EKSEKUTIF



Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020, tugas pokok dan fungsi inspektorat adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Inspektorat pada tahun 2023 telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Grafik. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2023



Berdasarkan grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2023 di atas, IKU yang capaiannya di atas 100% adalah IKU 2 (114,67%) dan IKU 4 (120%). IKU yang capaiannya 100% yaitu IKU 5, IKU 6, IKU 9, dan IKU 13. Untuk IKU 10 tidak dapat dilakukan penilaian dikarenakan adanya perubahan kebijakan. Sedangkan selebihnya mendapatkan kategori “Baik” dengan rentang penilaian diantara 80-100%.

Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Inspektorat tahun 2023 yaitu 99,79% yang diperoleh dari total penjumlahan Nilai Kinerja Perspektif.

Nilai maturitas SPIP BKN tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator BPKP berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan tingkat maturitas “Terdefinisi”.

Selama tahun 2023, telah disusun 2 (dua) buah Keputusan Kepala BKN (Kepka BKN) yakni Kepka BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan BKN pada 6 April 2023 dan Kepka BKN Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN pada 14 April 2023.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat TA 2023 Cetakan ke-3, Pagu Awal Inspektorat adalah sebesar Rp 813.184.000. Terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp 162.637.000. Pada awal bulan September 2023 Inspektorat mengajukan penambahan anggaran dan telah disetujui yaitu sebesar Rp 317.229.000. Sehingga total anggaran Inspektorat tahun 2023 yaitu sebesar Rp.967,776,000 dengan realisasi Inspektorat hingga 31 Desember 2023 berada pada presentasi 98.29% sebesar Rp951.226.556 dengan jumlah sisa anggaran Inspektorat sebesar Rp16.549.444.

Dari total pagu anggaran yang terserap, capaian output berupa Laporan Hasil Audit (LHA) sebanyak 6 dokumen, Laporan Hasil Reviu (LHR) sebanyak 15 dokumen, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebanyak 21 dokumen, serta Laporan Pengawasan lainnya sebanyak 63 dokumen. Persentase capaian output laporan berdasarkan target tercapai 100%. Secara umum, tugas pokok Inspektorat telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 2023.

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat digambarkan secara jelas dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai sejauh mana capaian kinerja organisasi dan dampaknya kepada pelayanan kepada masyarakat.

Peran strategis yang diemban oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai unsur penunjang dan pengawas internal BKN, Inspektorat dituntut untuk mengawal pencapaian sasaran strategis BKN dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKN berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk

memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.

3. Mendukung pencapaian sasaran kinerja manajemen Aparatur Sipil Negara dengan mengoptimalkan/mendayagunakan pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran kinerja Unit Kerja serta mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Inspektorat memiliki kedudukan sebagai unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama, serta dipimpin oleh seorang Inspektur. Adapun tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN. Untuk menjalankan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan, dan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Struktur organisasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiri dari:

- 1 (satu) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- 1 (satu) Jabatan Pengawas
- Auditor

- Analis Kinerja
- Pengelola Kegiatan dan Anggaran
- Sekretaris

Dari jabatan tersebut di atas, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Inspektorat, masih ada beberapa jabatan yang harus segera dilengkapi yaitu Auditor Pertama, Auditor Terampil, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Sekretaris dan Pengelola Data.

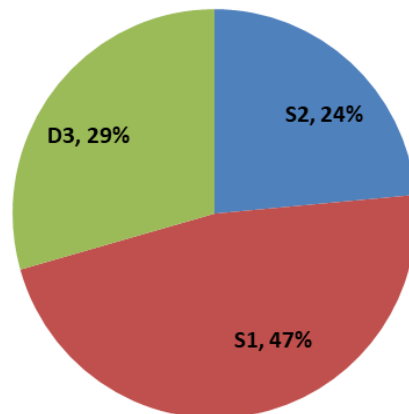
Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN



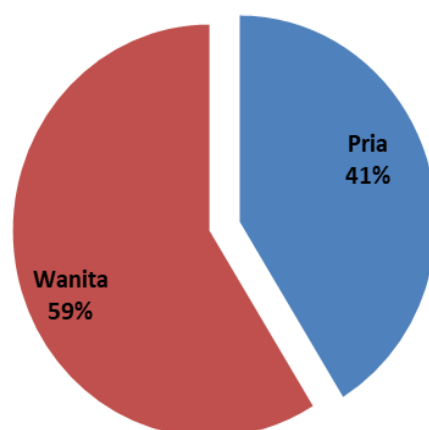
Tabel. 1.
Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN
Per Desember 2023 Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan				Jumlah	Persentase (%)
		S2	S1	D3	SMA		
1	JPT Pratama	1	-	-	-	1	2,94
2	Pengawas	-	1	-	-	1	2,94
3	Auditor Madya	4	2	-	-	6	17,65
4	Auditor Muda	2	2	-	-	4	11,76
5	Auditor Pertama	-	9	-	-	9	26,47
6	Auditor Penyelia	-	-	1	-	1	2,94
7	Auditor Mahir	-	1	3	-	4	11,76
8	Analisis Kinerja	1	1	-	-	2	5,88
9	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-	-	1	-	1	2,94
10	CPNS Auditor Terampil	-	-	5	-	5	14,71
TOTAL		8	16	10	-	34	100

Grafik. 1
Persentase Sumber Daya Manusia Tahun 2023
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik. 2
Persentase Sumber Daya Manusia Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel. 2
Kondisi dan Kebutuhan Sumber Daya di Inspektorat Berdasarkan Peta
Jabatan pada Kepka BKN Nomor 150.1 Tahun 2022

Jabatan	Kebutuhan	Kondisi saat ini	Kekurangan
Inspektur	1	1	0
Kasubag Tata Usaha	1	1	0
Auditor Utama	3	0	3
Auditor Madya	9	6	3
Auditor Muda	27	4	23
Auditor Pertama	18	9	9
Auditor Penyelia	12	1	11
Auditor Pelaksanaan Lanjutan	12	4	8
Auditor Pelaksana	12	5	7
Analisis SDM Aparatur Muda	1	0	1
Analisis SDM Aparatur Pertama	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	0	1
Analisis Kinerja	2	2	0

Jabatan	Kebutuhan	Kondisi saat ini	Kekurangan
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	0	1
Pengelola Data	1	0	1
Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1	1	0
Sekretaris	1	0	1
J U M L A H	104	34	70

Tabel. 3
Kompetensi ASN Inspektorat berdasarkan tingkat Pendidikan Formal

Strata	Jurusan	Jumlah	Persentase
S2	Magister Manajemen	2	5,88 %
S2	Magister Sains	2	5,88%
S2	Magister Sains Ekonomi	1	2,94%
S2	Magister Administrasi Bisnis	2	5,88%
S2	Magister Administrasi Publik	1	2,94%
S1	Ekonomi	10	29,41 %
S1	Akuntansi	3	8,82 %
S1	Pendidikan Akuntansi	1	2,94 %
S1	Tehnik	2	5,88%
S1	Administrasi Bisnis	1	2,94%
D3	Akuntansi	9	26,47%
J U M L A H		34	100 %

1.3. Permasalahan Utama

Permasalahan utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah:

1. Akuntabilitas dan Kinerja Inspektorat BKN belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi;
2. Kapabilitas dan Profesionalisme ASN Inspektorat BKN belum mencapai level yang diharapkan pimpinan;

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern belum optimal;
4. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang belum terpenuhi sesuai dengan target pada Peta Jabatan;

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja Tahun 2023, Inspektorat menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator sasaran maupun indikator kinerja.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Inspektorat BKN mempunyai sasaran dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis BKN yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Sasaran dan program Inspektorat BKN yang mencakup Visi, Misi, Sasaran, serta pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, akan diuraikan dalam pernyataan visi dan pernyataan Misi, di bawah ini.

2.2. Visi Badan Kepegawaian Negara

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat berpedoman pada Visi BKN, yaitu: ***Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025.***

2.3. Misi Badan Kepegawaian Negara

Dengan melihat Visi tersebut di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap pegawai di lingkungan

Inspektorat sebagai langkah nyata dari tujuan organisasi, adapun Misi BKN merupakan landasan bagi Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun Misi BKN sebagai berikut.

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem Perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Aspek peningkatan akuntabilitas merupakan upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah, melalui peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan intern.

2.4. Sasaran Strategis Pengawasan

Sasaran Strategis yang terukur sehingga dapat dicapai keberhasilannya, adapun Sasaran Strategis Inspektorat adalah:

1. Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel;

4. Terwujudnya ASN di Lingkup Sestama BKN yang Kompeten;
5. Tersedianya sistem informasi ASN di Lingkup Sestama BKN yang handal dan mudah diakses;
6. Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
7. Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama secara efisien dan akuntabel.

2.5. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Inspektorat merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi BKN yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki dan dapat mengukur sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai. Adapun tujuan strategis Inspektorat ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas atas laporan keuangan BKN;
2. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKN;
3. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKN;
4. Meningkatnya kapabilitas APIP BKN;
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi (RB) pada komponen penguatan pengawasan;
6. Mendorong terbangunnya Zona Integritas unit kerja menuju WBK/WBBM;

2.6 Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun

target kegiatan, yang merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Tabel . 4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Kode SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Customer Perspectives				
SS.1.	Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	IKU.1	Level Maturitas SPIP	4
		IKU.2	Level Kapabilitas APIP (IA-CM)	3
SS.2	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama	IKU.3	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	88,5
Internal Process Perspectives				
SS.3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU.4	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di Lingkungan BKN	1
		IKU.5	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	100%
		IKU.6	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100%
		IKU.7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100%
Learning and Growth Perspectives				
SS.4	Terwujudnya ASN di Lingkup Settama BKN yang Kompeten	IKU.8	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	81
SS.5	Tersedianya sistem Informasi ASN di Lingkup Settama BKN yang Handal dan Mudah di Akses	IKU.9	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100

Kode SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
SS.6	Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	IKU.10	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN	36
		IKU.11	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Inspektorat BKN	75
SS.7	Terkelolanya anggaran di Lingkup Settama secara efisien dan akuntabel	IKU.12	Persentase realisasi anggaran di Inpektorat	100
		IKU.13	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	100

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat, cetakan ke-5 Tanggal 20 November 2023 bahwa pagu Inspektorat adalah sebesar **Rp. 967.776.000,-**

Pagu Anggaran Inspektorat awalnya sebesar Rp. 813.184.000,- berdasarkan hasil rapat evaluasi internal, Inspektorat membutuhkan anggaran perjalanan dinas pengawasan (audit), setelah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi maka anggaran Inspektorat mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp. 120.635.000,-** sehingga anggaran inspektorat menjadi **Rp. 967.776.000,-**

Tabel. 5
Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023

Kode	Program Kegiatan (Output dan Rincian Kegiatan)	Vol	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen			
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal.	1	Layanan	967.776.000
052.OA	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan	6.408.000

Kode	Program Kegiatan (Output dan Rincian Kegiatan)	Vol	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
052.OB	Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	1	Laporan	1.275.000
052.OC	Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	1.892.000
052.OD	Bimbingan Teknis SPIP	1	Laporan	10.800.000
052.OE	Rapat Koordinasi Internal	1	Laporan	36.333.000
052.OF	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	1	Kegiatan	527.155.000
052.OG	In House Training Kapabilitas Audit Internal	1	Kegiatan	58.500.000
052.OI	Penerapan Manajemen Risiko	1	Kegiatan	16.318.000
052.OK	Rapat Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Temuan BPK/BPKP/Inspektorat	1	Kegiatan	288.166.000
052.OM	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	1	Kegiatan	17.329.000
052.ON	Sharing Session Aplikasi Pengawasan	1	Kegiatan	3.600.000

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Inspektorat Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2023, pada umumnya telah mampu mencapai sasaran utama sesuai yang ditargetkan, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan organisasi. Sasaran utama yang dapat tercapai dengan baik adalah meningkatnya kepatuhan pengelola keuangan pada Satuan dan Unit kerja untuk menggunakan hasil audit sebagai bahan perbaikan pada perencanaan periode berikutnya.

3.1. Capaian Sasaran Kinerja Organisasi

Tabel. 6
Capaian Sasaran Kinerja 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Level Maturitas SPIP	4	3,351	Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-262/D2/05/2023 tanggal 27 Desember 2023, Hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BKN Tahun 2023, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan tingkat maturitas “Terdefinisi” .
2.	Level Kapabilitas APIP (IA-CM)	3	3,44	Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-195/D205/2/2023 tanggal 28 Desember 2023 Hal laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat BKN Tahun 2023 menyimpulkan bahwa Inspektorat BKN berada pada “Level 3” dengan skor “3,44”
3.	Indeks Kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	88	88,14	Telah dilakukan Survei pada Semester I dan II, Survei dilakukan melalui formulir elektronik yang disebar kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BKN untuk diisi oleh pegawai di lingkungan unit kerjanya melalui Nota Dinas Nomor 094/PR.06.01/ND/H/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Nota Dinas Inspektur Nomor 183/AI.08/ND/H/2023 tanggal 11 Desember 2023. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Inspektorat Tahun 2023 dengan Nilai Interval (1-4) sebesar 3,53, Nilai Interval (1-100) sebesar 88,14 dengan Mutu Layanan “B” dan Kinerja Unit “Baik” .
4.	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di Lingkungan BKN	1	2	Inspektorat berhasil menyusun 2 pedoman terkait pengawasan di tahun 2023 dari 1 target yang telah ditetapkan antara lain: telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepka Nomor 326.1 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN dan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Keterangan
				Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.
5.	Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	Berdasarkan laporan periode Januari sampai dengan November 2023 total pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 87 (delapan bulan tujuh) dimana 77 (tujuh puluh tujuh) pengaduan melalui Aplikasi WBS dan terdapat 10 (sepuluh) pengaduan selain melalui aplikasi WBS baik ditujukan ke Kantor Pusat maupun ke Kantor Regional dimana terdapat 78 pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti dan 9 pengaduan sedang dalam proses ditindaklanjuti. Laporan periode Desember sedang dalam tahap pengerjaan karena diterbitkan pada bulan Januari 2024.
6.	Presentasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100%	100%	Pelaksanaan Kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu sebanyak 105 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan Hasil Audit : 6 2. Laporan Hasil Reviu : 15 3. Laporan Hasil Evaluasi : 21 4. Laporan Pengawasan lainnya : 63
7.	Persentase Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100%	93%	Pada Triwulan IV telah diterbitkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun 2023 dengan persentase pencapaian sebesar 93%.
8.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	81	74,75	Indeks Profesionalitas (IP) ASN dinilai tahunan oleh Biro SDM. IP ASN Inspektorat sebesar 74,75 mengukur seberapa baik kompetensi SDM di lingkup Inspektorat. Selama Tahun 2023, SDM Inspektorat telah mengikuti berbagai pelatihan yang akan mendorong perbaikan IP. Selain itu, sebagai upaya peningkatan IP, Inspektorat senantiasa memfasilitasi administrasi kehadiran pegawai dan pengukuran kinerja pegawai sehingga dapat mencegah kelalaian yang mengakibatkan terjadinya hukuman disiplin.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Keterangan
9.	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100%	100%	Inspektorat berkomitmen untuk melakukan digitalisasi proses pelayanannya untuk memudahkan pemangku kepentingan. Secara umum, Inspektorat telah memanfaatkan sistem informasi yang telah menjadi standar di BKN. Adapun Aplikasi yang sering digunakan adalah sebagai berikut: LBP (Absensi), PRESENSI (Kendala, Dinas, Cuti dan Izin), EKINERJA (Data Pegawai dan Kinerja), SIPEPI (Data Gaji Pegawai), SPEKTRA (Monitoring perencanaan dan realisasi anggaran), DS (Digital Signature) SIONI (Monitoring Persediaan ATK), SIMONBAJA (Monitoring Pengadaan), E-TRAVEL (Perjalanan Dinas) serta SRIKANDI (Pengelolaan arsip).
10.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN	36	N/A	Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Adapun perubahan narasi semula "Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat" menjadi "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan Inspektorat". Dikarenakan perubahan peraturan tersebut sehingga untuk nilai pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat tidak dapat dimunculkan.

11.	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Inspektorat BKN	75	69,25	Berdasarkan penilaian dari Tim Evaluasi AKIP diperoleh nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat tahun 2023 sebesar 69,25 (enam puluh sembilan koma dua puluh lima) dengan predikat B (Baik).
12.	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat	100%	98,29%	Realisasi Inspektorat hingga 31 Desember 2023 berada pada presentasi 98.29%, dari pagu anggaran sebesar Rp.951.226.556 dengan jumlah sisa anggaran Inspektorat sebesar Rp16.549.444.
13.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	100%	Adapun Laporan tindak lanjut temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat terhadap unit kerja Inspektorat Tahun 2023 tidak ada temuan.

3.2 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima.

IKU.1. Level Maturitas SPIP.

Pada Triwulan IV telah disampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BKN tahun 2022/2023 nomor 79/B-AI.08/SD/A/2023 oleh Tim Penilai Inspektorat ke Tim Evaluator BPKP. Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-262/D2/05/2023 tanggal 27 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BKN Tahun 2023, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada **level 3** dengan skor **3,351** dan tingkat maturitas **“Terdefinisi”**.

Tabel. 7
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	*Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,191	3,351
2.	MRI	4,211	3,206
3.	IEPK	3,180	3,036

Sebagai upaya tindak lanjut dalam meningkatkan kompetensi SDM telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada tanggal 21 November 2023 dengan Narasumber dari BPKP dan dihadiri 43 peserta. Selain itu, telah dilakukan pula Rapat Pembahasan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2022-2023 dengan unit Penilaian Mandiri BKN pada November 2023.

Gambar. 2
Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dengan Narasumber dari BPKP



Berikut tabel skor Maturitas SPIP dari tahun 2020-2023, tahun 2021 diperoleh nilai 3.181 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP sedangkan pada tahun 2022 telah dilakukan Penilaian Mandiri oleh Tim Inspektorat dengan perolehan nilai 3.999 namun tidak dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP.

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada **level 3** dengan skor **3,351** dan tingkat maturitas **“Terdefinisi”** sehingga terdapat kenaikan nilai SPIP dari tahun 2021 ke tahun 2023 sebesar 0.163. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penilaian Maturitas SPIP yaitu Hasil Penilaian Mandiri SPIP tergantung dari jadwal Tim Evaluator BPKP.

Tabel. 8
Perbandingan Level Maturitas SPIP dengan Renstra

NO.	TAHUN	RENSTRA	REALIASI	SKOR	TINGKAT MATURITAS
1.	2020	Level 3	Level 3	3,176	Terdefinisi
2.	2021	Level 3	Level 3	3,181	Terdefinisi
3.	2022	Level 3	Level 3	3,999	Terdefinisi
4.	2023	Level 4	Level 3	3,351	Terdefinisi

IKU.2. Level Kapabilitas APIP (IA – CM).

Pada tahun 2023 Tim Kapabilitas APIP telah menyampaikan kepada tim evaluator BPKP Permohonan Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023 Nomor 10515/B-AI.03/SD/H/2023 pada November 2023. Berdasarkan surat dari BPKP nomor PE.09.03/LHP-195/D205/2/2023 tanggal 28 Desember 2023 diperoleh kesimpulan hasil evaluasi bahwa Kapabilitas Inspektorat BKN telah berada pada **“Level 3”** dengan skor **“3,44”** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Tabel. 9
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023

No.	ELEMEN	LEVEL	SKOR
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72
2	Praktik Profesional	3	0,63
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,23
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	4	0,48
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
6	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,44

Kami telah membangun infrastruktur (berupa Kebijakan, SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis, dsb) dan mengimplementasikan setiap topik Kapabilitas APIP secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sehingga terwujud peran APIP yang efektif.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP, kami telah melaksanakan penilaian telaah sejawat internal secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali antar tim. Pelaksanaan tersebut dilakukan terakhir pada tahun 2022 dengan nilai rata-rata 83,98. Serta perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan bukti dukung pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Tabel. 10
Perkembangan Kapabilitas APIP 2019-2023

Tahun	Target (nilai)	Capaian (nilai)	Persentase (%)
2019	3,00	3,00	100
2021	3,00	3,00	100
2022	3,00	3,24	108
2023	3,00	3,44	114

Berdasarkan tabel perkembangan kapabilitas APIP, dapat dilihat terdapat peningkatan nilai sebesar 0.20 dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Di tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa langkah untuk memenuhi target nilai kapabilitas APIP, diantaranya yaitu:

1. Penyusunan PKPT 2023 telah menggunakan profil risiko organisasi secara keseluruhan (ERM) yang mengacu ke Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan *Audit Universe* dari BKN;
2. Inspektorat BKN telah melaksanakan kegiatan asuransi atas GRC, yang berpedoman pada antara lain Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang telah memuat penjelasan tahapan persiapan, pelaksanaan *assurance* serta pelaporan, serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepka Nomor 326.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN;
3. Inspektorat telah melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Manajemen Risiko di Lingkungan BKN untuk mendukung unit kerja dalam meningkatkan level kapabilitas APIP Tahun 2023, dimana kegiatan dilakukan secara luring pada tanggal 25-26 Mei 2023 dihadiri perwakilan dari Sekretaris Komite

Manajemen Risiko, Tim UPR Entitas BKN, Tim UPR Entitas JPT Pratama Kantor Regional I-XIV BKN, serta Tim UPR Entitas Pusbangpeg ASN;

4. Inspektorat telah menyusun 2 pedoman terkait pengawasan di tahun 2023 yaitu Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Kepala BKN Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
5. Inspektorat telah melakukan penyusunan perencanaan anggaran RKA K/L Tahun 2023 untuk sub komponen Penerapan Manajemen Risiko senilai Rp.16.318.000 dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan peningkatan nilai Kapabilitas APIP di Lingkungan BKN.

Gambar. 3
Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Manajemen Risiko



3.3 Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.

IKU.3. Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
5. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat;
6. Mengetahui tingkat kepuasan pegawai BKN terhadap kualitas layanan yang diberikan Inspektorat, baik yang dirasakan oleh unit kerja di Kantor Pusat maupun satuan kerja Kantor Regional BKN;
7. Sebagai umpan balik bagi seluruh unit kerja BKN terhadap kinerja layanan yang diberikan;
8. Sebagai masukan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan;
9. Sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di Inspektorat.

Sebagai sasaran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (pengguna jasa inspektorat) ini adalah auditee di seluruh satker Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan dari 9 unsur. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Berdasarkan hasil pengolahan data dari responden survei diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 11
Nilai rata-rata Sub Unsur Tahun 2023

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI
Persyaratan	1.	Dokumen kelengkapan yang diminta Auditor mudah dipahami	3,46
	2.	Pegawai Inspektorat bebas dari kepentingan pribadi dan golongan	3,60
	3.	Pegawai Inspektorat tidak menyalahgunakan wewenang	3,58
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Isi Laporan Hasil Audit/ Reviu bermanfaat bagi Satker/Unit kerja dan mudah dipahami	3,49
	2.	Isi Laporan Hasil Audit/ Reviu sesuai dengan fakta dilapangan	3,52
	3.	Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di inspektorat mudah dimengerti dan dipahami	3,46
Waktu Penyelesaian	1.	Pelayanan yang diberikan Inspektorat Tepat Waktu	3,46
	2.	Laporan Hasil Audit/Reviu disampaikan Tepat Waktu	3,49
Biaya Tarif	1.	Pelayanan yang diberikan Inspektorat Gratis	3,67
	2.	Pegawai Inspektorat dalam memberikan pelayanan kepada Satker/Unit Kerja tidak mengharapkan imbalan berupa Uang, Barang dan Fasilitas	3,65
Produk Spesifikasi	1.	Layanan yang diberikan oleh Inspektorat telah sesuai dengan kebutuhan Satker/Unit Kerja	3,49

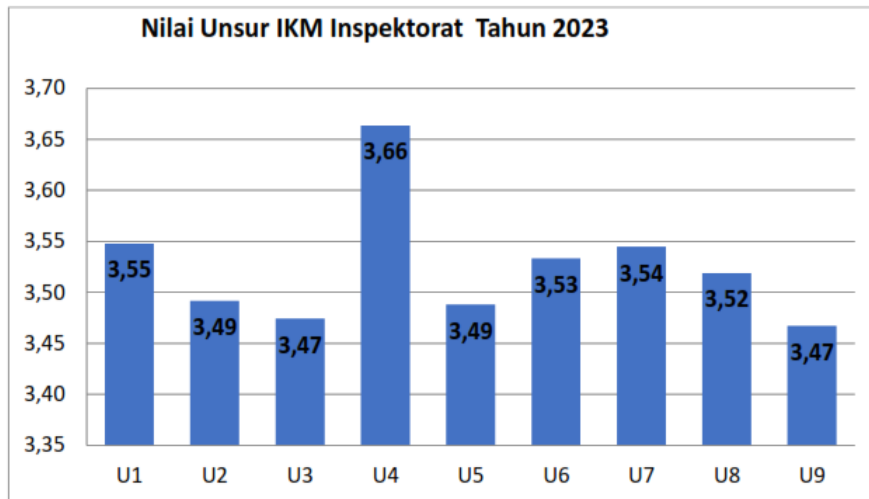
Unsur	No.	Pernyataan	NILAI
Jenis Layanan	2.	Inspektorat telah memberikan Layanan konsultasi yang optimal terkait permasalahan yang dihadapi satker/unit kerja	3,50
	3.	Inspektorat bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi	3,49
	4.	Inspektorat telah memberikan pendampingan yang optimal dalam penyusunan profil risiko unit	3,48
Kompetensi Pelaksana	1.	Pegawai Inspektorat memiliki kemampuan bekerjasama dengan baik	3,53
	2.	Pegawai Inspektorat telah memiliki Kompetensi Teknis yang Memadai	3,51
	3.	Pegawai Inspektorat telah bekerja dengan menunjukkan Integritas yang Tinggi	3,56
Perilaku Pelaksana	1.	Berkomunikasi dengan lancar saat memberikan pelayanan	3,54
	2.	Ramah dan santun dalam memberikan pelayanan	3,55
	3.	Berpenampilan rapi dalam memberikan pelayanan	3,57
	4.	Pegawai Inspektorat tidak memberikan perlakuan khusus pada orang tertentu	3,56
	5.	Inspektorat telah melakukan kampanye/Himbauan anti korupsi dan Gratifikasi	3,50
	6.	Pegawai Inspektorat yang berurusan dengan Satker/Unit Kerja telah melaksanakan tugas dengan baik	3,55
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Inspektorat menerima keluhan/Permasalahan dengan baik	3,51
	2.	Inspektorat telah menindaklanjuti dengan cepat dan tepat keluhan/permasalahan yang diajukan Satker/Unit Kerja	3,50
	3.	Inspektorat memberikan saran/rekomendasi/asistensi yang tepat dan dapat diaplikasikan	3,51

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI
	4.	Inspektorat telah memberikan layanan yang dapat meningkatkan/memperbaiki kinerja dari Satker/Unit Kerja	3,50
	5.	Inspektorat telah memproses segala Bentuk Pelanggaran yang dilakukan Pegawai BKN sesuai ketentuan yang berlaku	3,51
	6.	Inspektorat telah memberikan perlindungan (menjaga kerahasiaan pelapor) terhadap laporan pengaduan	3,54
	7.	Inspektorat telah menindaklanjuti Laporan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.	3,55
Sarana dan Prasarana	1.	Inspektorat telah memiliki tata cara dan pedoman menerima laporan pengaduan	3,49
	2.	Inspektorat telah menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan oleh Satker/Unit Kerja	3,44

Survei dilakukan melalui formulir elektronik yang disebar kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN Pusat, Kepala Kantor Regional I-XIV BKN, Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN, serta Kepala UPT BKN untuk diisi oleh pegawai di lingkungan unit kerjanya melalui Nota Dinas Nomor 094/PR.06.01/ND/H/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Nota Dinas Nomor 183/AI.08/ND/H/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Pada Tahun 2023, dari 272 responden yang mengisi formulir survei diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,53, Nilai Interval Konversi **88,14**, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik). Nilai yang diperoleh dari setiap unsur juga tidak memiliki rentang yang terlalu jauh, dengan standar deviasi sebesar 0,028. Grafik nilai setiap unsur dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik. 3
Nilai Unsur 1-9 pada IKM Inspektorat 2023



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai terkecil berada di unsur 3 dan 9 dengan skor 3,47, yaitu “Waktu Penyelesaian” dan “Sarana dan Prasarana”. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat agar Pelayanan yang diberikan Inspektorat Tepat Waktu dan menyediakan Sarana dan Prasarana yang lebih memadai. Sementara nilai tertinggi ada pada unsur 4 dengan skor 3,66, yaitu “Biaya Tarif”. Hal ini menjadi poin positif yang harus dipertahankan bahwa Pelayanan yang diberikan Inspektorat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, konversi nilai IKM dilakukan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 12
Konversi Nilai IKM Inspektorat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (1-100)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat untuk periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 13
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat tahun 2023

Ukuran	Nilai
Nilai Persepsi	3
Nilai Interval (1-4)	3,53
Nilai Interval (1-100)	88,14
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit	Baik

Grafik. 4
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Inspektorat Tahun 2020 – 2023



Dibandingkan hasil survei Tahun 2022, indeks kepuasan pelayanan Inspektorat mengalami kenaikan sebesar 1,61 poin dari yang sebelumnya 86,53 sebagaimana terlihat pada grafik.

Berdasarkan laporan survei tersebut terdapat beberapa saran dan masukan dari auditee sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan atas pengawasan internal yang Inspektorat lakukan di tahun mendatang yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada pegawai BKN Khususnya pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan benturan kepentingan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Memberitahukan dan menyampaikan kepada seluruh Satker dan unit kerja terkait SOP yang ada di lingkungan Inspektorat agar mudah dimengerti dan dipahami;
3. Mensosialisasikan kembali kepada seluruh Satker dan unit kerja terkait SOP yang ada di lingkungan Inspektorat agar mudah dimengerti dan dipahami;
4. Memperlakukan auditi dan pegawai unit kerja yang dilayani secara profesional tanpa dipengaruhi kedekatan pribadi;
5. Meningkatkan kesepahaman antar auditor terkait setiap isu dengan berlandaskan pada aturan hukum yang kuat.
6. Meningkatkan Kompetensi SDM Khususnya Auditor;
7. Bersikap lebih halus dan rendah hati dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dilayani;
8. Mengadakan FGD (Forum Group Discussion) bersama seluruh auditi atau unit kerja yang dilayani sebagai bentuk konsultasi dan penerimaan masukan;
9. Membuat kanal atau narahubung yang dapat digunakan oleh unit kerja untuk bertanya dan berkonsultasi kepada auditor Inspektorat;
10. Melakukan pendampingan dengan seluruh Satker / Unit kerja terkait pengelolaan kinerja dan anggaran;
11. Mengembangkan Inspektorat Service Center terkait dengan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Risiko, Konsultasi, WBS dan pelaporan Gratifikasi agar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh Seluruh Satker dan Unit kerja.

3.4. Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel.

IKU.4. Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN.

Selama tahun 2023, telah disusun 2 (dua) buah Keputusan Kepala BKN (Kepka BKN) yakni Kepka BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan BKN pada 6 April 2023 dan Kepka BKN Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN pada 14 April 2023.

Telah dilakukan Sosialisasi melalui Zoom mengenai Kepka BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan BKN pada tanggal 5 Mei 2023. Demikian pula Sosialisasi mengenai Kepka BKN Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN serta Bimtek Aplikasi Manajemen Risiko di lingkungan BKN dilakukan secara luring di Aula BKN Gedung 1 pada tanggal 25 Mei 2023.

Gambar. 4
Kegiatan Sosialisasi pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan BKN



Tabel. 14
Perbandingan Target dan Realisasi Penyusunan Pedoman di Inspektorat tahun 2020-2023

Tahun	Target (pedoman)	Realisasi (pedoman)
2020	1	1
2021	1	2
2022	1	1
2023	1	2

IKU.5. Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti.

Selama tahun 2023, jumlah pengaduan internal dan eksternal yang masuk ke Inspektorat BKN sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Melalui WBS sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh)
2. Melalui selain dari WBS baik ke Kantor Pusat maupun ke Kantor Regional sejumlah 10 (sepuluh).

Dari total 87 (delapan puluh enam) pengaduan tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pengaduan sudah selesai diproses dan 9 (sembilan) pengaduan sedang dalam proses ditindaklanjuti. Dengan demikian persentase penyelesaian pengaduan sebesar 89,65% dari total pengaduan yang diterima sepanjang 2023. Data tersebut diperoleh dari Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS yang disampaikan oleh Tim WBS periode bulan Januari sampai dengan November 2023 sedangkan pelaporan periode Desember 2023 akan diterbitkan pada Januari 2024 hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Tabel. 15
Data Pengaduan kepada Inspektorat Tahun 2020 s.d 2023

No	Sarana Pengaduan	2020			2021			2022			2023		
		Masuk	Sel esa i diti nd akl anj uti	Dala m Pro ses	Mas uk	Sele sai diti ndakl anj uti	Dala m Pro ses	Mas uk	Sele sai diti ndakl anj uti	Dala m Pro ses	Mas uk	Sele sai diti ndakl anj uti	Dala m Pro ses
1.	WBS	0	0	0	1	1	0	80	80	0	78	78	0
2.	Pengaduan di luar WBS	20	20	0	25	25	0	10	7	3	9	0	9
JUMLAH		20	20	0	26	26	0	90	87	3	87	78	9

IKU.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan

Selama tahun 2023, Inspektorat berhasil melaksanakan audit internal sebanyak 6 (enam) kali pada unit kerja Pusat maupun Kantor Regional termasuk atas audit PNBPN. Rincian Laporan Audit, Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit:
 1. Laporan Hasil Audit Operasional pada Direktorat Infrastruktur dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2021;
 2. Laporan Hasil Audit PNBPN pada Pusat Penilaian Kompetensi ASN Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022;
 3. Laporan Hasil Audit Kinerja atas Tunjangan Kinerja di Lingkungan BKN;
 4. Laporan Hasil Audit pada Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN Tahun Anggaran 2021;

5. Laporan Hasil Audit pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV Tahun Anggaran 2021;
6. Laporan Hasil Audit Operasional pada Biro Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021;

2. Laporan Hasil Reviu:

1. Laporan Hasil Reviu Revisi Perencanaan Kebutuhan BMN BKN Tahun Anggaran 2023;
2. Laporan Hasil Reviu Usulan Tambahan Anggaran BKN Tahun Anggaran 2023;
3. Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada BKN;
4. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BKN Laporan Keuangan BKN Semester II Tahun 2022;
5. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2022;
6. Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Triwulan I Tahun Anggaran 2023;
7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BKN Semester I Tahun 2023;
8. Laporan Hasil Reviu Usulan Tambahan Anggaran BKN Tahun Anggaran 2023;
9. Laporan Hasil Reviu Bukti Pertanggungjawaban Biaya Non Personil Kantor Regional VI BKN Medan;
10. Laporan Hasil Reviu RKA Pagu Anggaran TA 2024;
11. Laporan Hasil Reviu RKA Atas Tambahan Anggaran BABUN Belanja Pegawai;
12. Laporan Hasil Reviu Usulan Tambahan Anggaran BKN TA 2023;
13. Laporan Hasil Reviu Usulan Tambahan Anggaran BKN TA 2023;
14. Laporan Hasil Reviu RKBMN TA.2025;
15. Laporan Hasil Reviu LK BKN Triwulan III TA 2023.

3. Laporan Hasil Evaluasi:

1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretaris Utama BKN Tahun 2023;
2. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2023;
3. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Tahun 2023;
4. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2023;
5. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023;
6. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Tahun 2023;
7. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Tahun 2023;
8. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta Tahun 2023;
9. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional II BKN Surabaya Tahun 2023;
10. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional III BKN Bandung Tahun 2023;
11. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional IV BKN Makassar Tahun 2023;

12. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional V BKN DKI Jakarta Tahun 2023;
 13. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional VI BKN Medan Tahun 2023;
 14. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional VII BKN Palembang Tahun 2023;
 15. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Tahun 2023;
 16. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2023;
 17. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional X BKN Denpasar Tahun 2023;
 18. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XI BKN Manado Tahun 2023;
 19. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2023;
 20. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Tahun 2023;
 21. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2023.
4. Laporan Hasil Pengawasan Lainnya:
1. Laporan Monitoring & Evaluasi Benturan Kepentingan BKN Tahun 2022;

2. Laporan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di BKN Tahun 2022;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022;
4. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Inspektorat Tahun 2022;
5. Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS Desember 2022;
6. Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS Tahun 2022;
7. Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS Januari- November 2023;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Tender Sewa Sarana dan Prasarana Seleksi Nasional Calon PPPK Tahun 2022;
9. Laporan Penanganan Gratifikasi Inspektorat BKN Bulan Januari-November Tahun 2023;
10. Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi di Inspektorat Semester I dan Tahunan Tahun 2023;
11. Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Inspektorat Semester I dan Tahunan Tahun 2023;
12. Laporan Triwulan I-III NPSS dan Rincian Target Kinerja Inspektorat IKU 2023;
13. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Inspektorat Triwulan I-III 2023;
14. Laporan Kinerja Inspektorat Triwulan I-III Tahun 2023;
15. Laporan Hasil Exit Meeting BPK di Kantor Regional II BKN Surabaya TA. 2022 dan 2023;
16. Laporan Penyelenggaraan Risiko Inspektorat Semester I Tahun 2023;

17. Laporan Pelaksanaan Komunitas Belajar - Implementasi Evaluasi AKIP
18. Laporan Pelaksanaan Komunitas Belajar - Sosialisasi Manajemen Risiko
19. Laporan Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 Bidang Pengawasan Pengelolaan Anggaran untuk pelaksanaan seleksi CPPPK yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023;
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Perencanaan sampai dengan Seleksi Administrasi pada BKN;
21. Laporan Pemantauan P3DN di BKN Tahun 2023;
22. Laporan Penilaian Mandiri ZI Tahun 2023;
23. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan BKN Tahun 2023;
24. Laporan Tindak Lanjut Temuan atas Inspektorat Tahun 2023.

Berikut pencapaian Inspektorat dalam menyelesaikan laporan hasil audit, reuiu, maupun evaluasi dari tahun 2020 sampai dengan 2023, dimana persentase pencapaian setiap tahunnya yaitu 100%. Adapun pengerjaan Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reuiu, dan Laporan Hasil Evaluasi dikerjakan mengacu dari PKPT yang disusun setiap tahunnya.

Tabel. 16

Data LHA, LHR, dan LHE Inspektorat Tahun 2020 s.d 2023

	2020			2021			2022			2023		
	LHA	LHR	LHE	LHA	LHR	LHE	LHA	LHR	LHE	LHA	LHR	LHE
Jumlah	12	9	20	15	12	29	15	12	29	6	15	21
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IKU.7. Persentase Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan.

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang sesuai di dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia Nomor: PER01/AAIPI/DPN/2021 bahwa Pimpinan APIP harus memastikan dan memantau Audit telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif.

Pada Triwulan IV telah diterbitkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun 2023 dengan persentase pencapaian sebesar 93%.

Tabel. 17
Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut
Rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2023

Tahun TL	Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status			Persentase Pengajuan Sesuai
			Sesuai	Belum sesuai	Belum di TL	
2019	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	1	1	0	0	100%
2020	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	5	2	0	3	40%
2020	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	9	9	0	0	100%
2020	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7	7	0	0	100%
2020	Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara	6	6	0	0	100%
2020	Kantor Regional IX BKN	9	9	0	0	100%

Tahun TL	Unit Kerja	Total Rekomend asi	Status			Persentase Pengajuan Sesuai
			Sesuai	Belum sesuai	Belum di TL	
	Jayapura					
2020	Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara	4	4	0	0	100%
2021	Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara	9	9	0	0	100%
2021	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	8	8	0	0	100%
2021	Kantor Regional V BKN Jakarta	5	5	0	0	100%
2021	Kantor Regional VI BKN Medan	4	4	0	0	100%
2021	Kantor Regional VII BKN Palembang	7	7	0	0	100%
2021	Kantor Regional XI BKN Manado	2	2	0	0	100%
2021	Kantor Regional III BKN Bandung	2	2	0	0	100%

Tahun TL	Unit Kerja	Total Rekomend asi	Status			Persentase Pengajuan Sesuai
			Sesuai	Belum sesuai	Belum di TL	
2021	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4	4	0	0	100%
2021	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	5	5	0	0	100%
2021	Direktorat Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	2	2	0	0	100%
2021	Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara	2	2	0	0	100%
2021	Direktorat Kinerja ASN	2	2	0	0	100%
2021	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	15	15	0	0	100%
2021	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	3	3	0	0	100%
2021	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	6	6	0	0	100%

Tahun TL	Unit Kerja	Total Rekomend asi	Status			Persentase Pengajuan Sesuai
			Sesuai	Belum sesuai	Belum di TL	
2022	Kantor Regional IV BKN Makassar	28	28	0	0	100%
2022	Kantor Regional IX BKN Jayapura	10	10	0	0	100%
2022	Kantor Regional VI BKN Medan	5	5	0	0	100%
2022	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	2	2	0	0	100%
2023	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	6	6	0	0	100%
2023	Direktorat Infrastruktur dan Teknologi Informasi	4	4	0	0	100%
2023	Biro SDM	8	1	4	3	13%
2023	Biro Keuangan	3	0	0	3	0%
TOTAL		183	170	4	9	93%

Dari tabel di atas terdapat beberapa unit kerja yang masih belum ditindaklanjuti diantaranya yaitu Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, Biro Sumber Daya Manusia, dan Biro Keuangan.

3.5. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya ASN di lingkup Sestama BKN yang Kompeten.

IKU.8. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat.

Dalam rangka Pelaksanaan dan penerapan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya memberi Mandat untuk mewujudkan ASN/PNS yang Profesional dan RPJMN 2020 – 2024 serta Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 yang didalamnya tertuang pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN pada Instansi Pemerintah, berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesional ASN.

Berdasarkan Surat Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara Nomor 330/B-KP.05.02/SD/A.II/2023 tanggal 12 Desember 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023, Inspektorat memperoleh nilai sebesar **74,75**.

Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi yang meliputi dimensi Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%. Perolehan Indeks Profesional tersebut dikategorikan sebagai berikut :

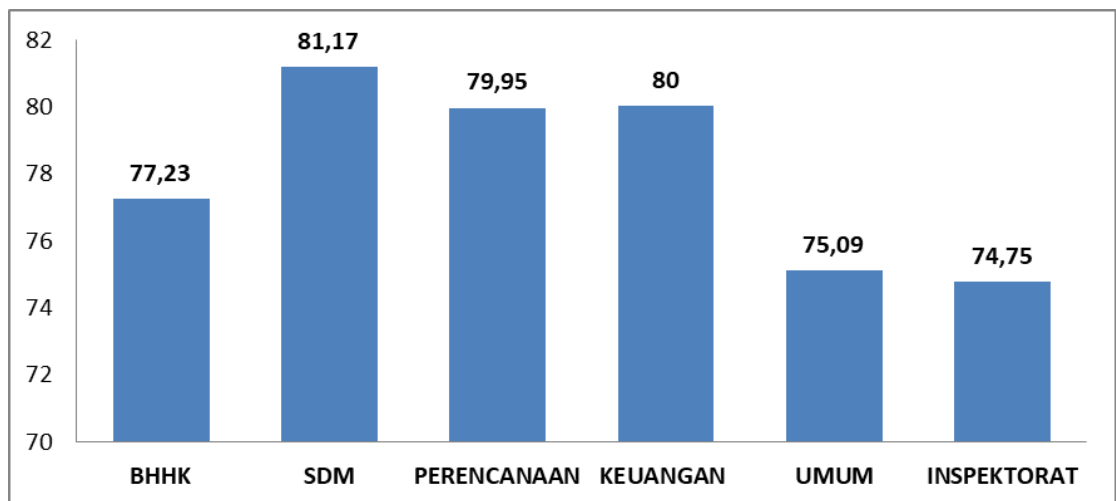
1. Nilai IP 51 – 60 Kategori sangat rendah
2. Nilai IP 61 – 70 Kategori rendah
3. Nilai IP 71 – 80 Kategori sedang
4. Nilai IP 81 – 90 Kategori tinggi dan
5. Nilai IP 91 – 100 kategori sangat tinggi.

Dengan demikian Inspektorat yang memperoleh Nilai IP ASN sebesar **74,75** masuk dalam **kategori sedang**.

Tabel. 18
Nilai IP ASN Lingkup Sekretariat Utama

No	Unit Kerja	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP
1.	Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	21,37	25,77	25,14	4,94	77,23
2.	Biro Sumber Daya Manusia	21,06	30,14	25	4,97	81,17
3.	Biro Perencanaan dan Organisasi	21,66	29,16	24,14	5	79,95
4.	Biro Keuangan	21,50	28,49	25	5	80,00
5.	Biro Umum	20,14	25,22	24,77	4,95	75,09
6.	Inspektorat	21,21	23,13	25,42	5	74,75

Grafik. 5
Nilai IP ASN Lingkup Sekretariat Utama



Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Sekretariat Utama, bahwa Nilai tertinggi diperoleh Biro Sumber Daya Manusia sebesar 81,17 dan yang paling rendah adalah Inspektorat sebesar 74,75.

Tahun 2023 Inspektorat memberikan peluang kepada para ASN Inspektorat untuk mengikuti pengembangan diri. Adapun

pengembangan diri yang telah diikuti oleh ASN Inspektorat selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 19

Pegawai Inspektorat yang mengikuti Pengembangan Diri

No	Nama Pelatihan	Peserta
1	Webinar Nasional 2023 Legal Perspective on Forensic Accounting	1. Fitri Dwijayanti, SE
2	Workshop Penyusunan Draf Laporan Keuangan BKN TA 2022 (Unaudited)	Diikuti oleh 11 Auditor dari Tim 2 dan Tim 4
3	In House Training Diklat Evaluasi SAKIP secara Daring di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	Seluruh Auditor
4	Webinar Smart Discussion Series 05 Tahun 2023 dengan tema Memahami SAKIP Berdasarkan PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 melalui aplikasi Zoom	1. Arniz Kusumawardhani, SE, M.SE, MA 2. Fitri Dwijayanti, SE 3. Irma Fibriana, S.E.
5	Webinar Probitiy Audity yang diselenggarakan oleh Komite Pengembangan Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia (AAIPI)	1. Arie Puspanti, SE, Ak., M.Si 2. Melly Pattinasarani, SE
6	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1, Batch 6 Tahun 2023	1. Arie Puspanti, SE, Ak., M.Si 2. Raden Ayu Syafria Shabira, SE
7	Seminar on Creating High-Performance Culture in Public Sector oleh ACCSM Indonesia	1. Novita Dewi Cahyani, SE, M.AB 2. Nurlinda Sari, S. Pd 3. Rahayu Sundari, A.Md 4. Akhmar Bayhaqi, A.Md 5. Esra Yepasa, SE
8	Sharing Session on Creating High-Performance Culture in Public Sector oleh Direktorat Kinerja	1. Novita Dewi Cahyani, SE, M.AB 2. Nurlinda Sari, S. Pd 3. Rahayu Sundari, A.Md 4. Akhmar Bayhaqi, A.Md 5. Esra Yepasa, SE
9	Pelatihan dan Sertifikasi serta Uji Kompetensi	Mar'an Hoven, S.Kom, SH, M.AB

	Information Technology Auditor (IT Auditor) Batch 3 Tahun 2023	
10	Workshop Pemanfaatan Forensik Digital dan Analisis Data bagi APIP	Mar'an Hoven, S.Kom, SH, M.AB
11	Pelatihan Jarak Jauh Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagi Kementerian/Lembaga;	1. Arniz Kusumawardhani, SE, M.SE, MA 2. Fitri Dwijayanti, SE 3. Irma Fibriana, S.E.
12	Workshop Laporan Keuangan Semester I TA 2023	Diikuti oleh 11 Auditor dari Tim 2 dan Tim 4
13	Bimbingan Teknis Aplikasi Manajemen Risiko di Lingkungan BKN	Seluruh Pegawai Inspektorat BKN
14	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP	Seluruh Pegawai Inspektorat BKN

Berikut perbandingan perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Inspektorat mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel. 20
Perkembangan IP ASN Inspektorat 2021-2023

Tahun	Target (nilai)	Capaian (nilai)	Persentase (%)
2021	80	79,81	99,76
2022	81	73,86	91,19
2023	81	74,75	92,28

Gambar. 5
Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP



3.6 Sasaran Strategis 5 : Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses.

IKU. 9. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat.

Persentase integrasi sistem informasi ASN adalah persentase terintegrasinya aplikasi secara menyeluruh berbasis teknologi yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan di lingkungan Inspektorat.

Adapun Aplikasi yang digunakan di lingkungan Inspektorat antara lain:

1. Aplikasi e-Lapor yang digunakan masyarakat untuk melaporkan atau pengaduan yang ditujukan kepada Inspektorat.
2. Whistle Blowing System merupakan sarana pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Whistle Blowing System, Inspektorat dapat melakukan Monitoring dan tindak lanjut pengaduan tersebut.
3. Aplikasi Internal yang disediakan BKN dan dipergunakan oleh Inspektorat antara lain

- a. Aplikasi LBP;
 - b. Aplikasi PRESENSI;
 - c. Aplikasi E-KINERJA;
 - d. Aplikasi SIPEPI;
 - e. Aplikasi SPEKTRA;
 - f. Aplikasi DS;
 - g. Aplikasi SIONI;
 - h. Aplikasi SIMONBAJA;
 - i. Aplikasi E-TRAVEL;
 - j. Aplikasi SRIKANDI.
4. Aplikasi Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat menggunakan Google Drive sebagai media informasi Persuratan dan Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi kegiatan.

Aplikasi tersebut diatas digunakan sebagai penunjang kegiatan di lingkungan Inspektorat. Berikut perbandingan pemanfaatan Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel. 21
Pemanfaatan Sistem Informasi pada Inspektorat Tahun 2020-2023

Tahun	Target (persentase)	Capaian (persentase)
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
2023	100	100

3.7. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

IKU.10. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Adapun perubahan narasi semula "Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat" menjadi "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan Inspektorat". Dikarenakan perubahan peraturan tersebut sehingga untuk nilai pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat tahun 2023 tidak dapat dimunculkan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN, Inspektorat bertanggungjawab atas komponen Penguatan Pengawasan. Adapun komponen penguatan pengawasan dalam reformasi Birokrasi meliputi:

a. Gratifikasi

Dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berada di Inspektorat, dibentuk tim dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 6.1 Tahun 2023 tentang Unit Pengendali Gratifikasi. Tim bertugas menerima laporan dari unit kerja dan menyampaikan laporan kepada KPK apabila ada gratifikasi yang dilaporkan dari unit kerja.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi, unit kerja yang berpotensi adanya gratifikasi adalah unit yang melakukan

pelayanan eksternal di bidang kepegawaian dan pelayanan pengadaan barang jasa. Pada setiap kesempatan Kepala BKN menyampaikan bahwa dalam pelayanan BKN tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan di beberapa tempat di buat sosialisasi “No Gratifikasi, No Korupsi” sebagai bentuk sosialisasi.

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023, terdapat pelaporan mengenai penerimaan gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara pada unit kerja Badan Kepegawaian Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 22
Rincian Gratifikasi Tahun 2023

NO	OBJEK PENGENDALI GRATIFIKASI	JUMLAH GRATIFIKASI
1	Inspektorat	25
2	Direktorat Pengawasan Pengendalian I	1
3	Direktorat Pengawasan Pengendalian II	10
4	Direktorat Pengawasan Pengendalian III	1
5	Direktorat Pengawasan Pengendalian IV	8
6	Kantor Regional IV BKN Makassar	15
7	Tanpa menyebutkan unit kerja	50
J U M L A H		110

Telah dilakukan pula kegiatan Sosialisasi Gratifikasi yang dilaksanakan pada Juli 2023 di Lingkungan Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

Gambar. 6
Kegiatan Sosialisasi Gratifikasi



b. Penerapan SPIP

Penerapan SPIP di Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 98/KEP/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dan telah dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) SPIP pada setiap Kedeputian dan Eselon II Mandiri sejumlah 21 (dua puluh satu).

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 049.0/AI.08/TU/H/2022 Tanggal: 29 Juni 2022, untuk melaksanakan tugas Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan tanggal 01 Juli s/d 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil Tim Evaluasi BPKP bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada **level 3** dengan skor **3,351** dan tingkat maturitas **“Terdefinisi”**.

Gambar. 7
Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP



c. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat melalui E-Lapor yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat BKN bahwa laporan pengaduan Masyarakat yang ditujukan ke Inspektorat selama tahun 2023 sejumlah 9 (sembilan).

d. Whistle Blowing System (WBS)

Whistle Blowing System merupakan sarana pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Whistle Blowing System yang dikelola oleh Inspektorat dan telah dilakukan Sosialisasi WBS yang diikuti oleh seluruh Kantor Regional dan unit kerja. Inspektorat telah membentuk tim untuk monitoring dan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang terkait ASN BKN. Berdasarkan laporan periode Januari sampai dengan November 2023 total pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 87 (delapan bulan tujuh) dimana 77 (tujuh puluh tujuh) pengaduan melalui Aplikasi WBS dan terdapat 10 (sepuluh) pengaduan selain melalui aplikasi WBS baik ditujukan ke Kantor Pusat maupun ke Kantor Regional dimana terdapat 78 pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti dan 9 pengaduan sedang dalam proses ditindaklanjuti.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di BKN diatur dalam Keputusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 115.2/KEP/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Laporan Nomor: 087/AI.08/LAP/H/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Hasil Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BKN tidak terdapat laporan terkait Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sepanjang tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 23
Rincian Laporan Benturan Kepentingan Tahun 2023

NO.	SATUAN / UNIT KERJA	JUMLAH LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2023
1.	Eselon 1	0
2.	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA	0
3.	BIRO KEUANGAN	0
4.	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	0
5.	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	0
6.	BIRO UMUM	0
7.	DIREKTORAT ARSIP KEPEGAWAIAN	0
8.	DIREKTORAT JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA	0
9.	DIREKTORAT KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA	0
10.	DIREKTORAT KOMPENSASI APARATUR SIPIL NEGARA	0
11.	DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA	0

12.	DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN	0
13.	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I	0
14.	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN II	0
15.	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN III	0
16.	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV	0
17.	DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI	0
18.	DIREKTORAT PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA	0
19.	DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	0
20.	DIREKTORAT STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN	0
21.	INSPEKTORAT	0
22.	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	0
23.	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	0
24.	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	0
25.	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	0
26.	KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA	0
27.	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	0
28.	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	0
29.	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	0
30.	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	0
31.	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	0
32.	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	0
33.	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	0
34.	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0
35.	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	0

36.	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPEGAWAIAN	0
37.	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN	0
38.	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	0
39.	PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI	0
40.	PUSAT PENGKAJIAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA	0
41.	PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	0
42.	PUSAT PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA	0
43.	ASISTEN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN	0

Gambar. 8
Video bahan Sosialisasi Benturan Kepentingan



f. Pembangunan Zona Integritas

Di tahun 2023, BKN telah membentuk Tim Zona Integritas, berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 1.7/KEP/2019

tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Zona Integritas pada Kantor Regional, eselon I, pusat pengembangan, dan pusat-pusat.

Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) maka ditetapkan 2 (dua) unit kerja yang kami usulkan memperoleh predikat WBK berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 5374/B-AI.08/SD/K/2023 tanggal 30 Mei 2023 yaitu:

1. Kantor Regional V BKN di DKI Jakarta;
2. Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin.

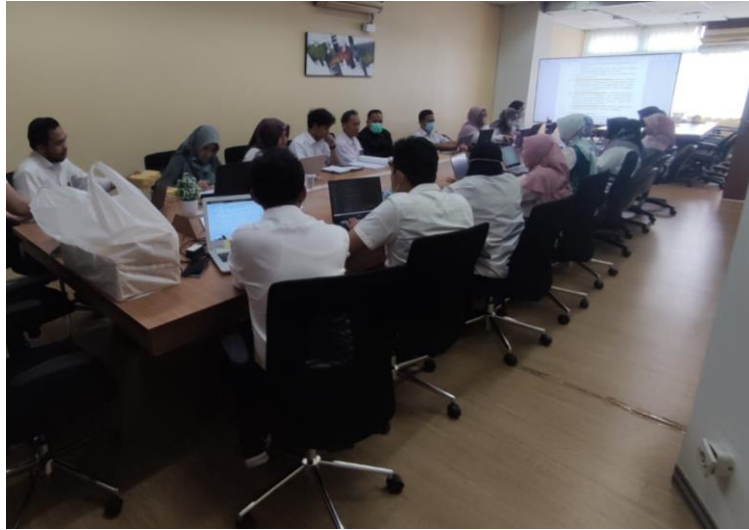
Gambar. 9
Kegiatan Bimbingan Teknis Zona Integritas



g. Kapabilitas APIP

Peningkatan kapabilitas APIP telah dilakukan di antaranya dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, dan menyusun infrastruktur manajemen risiko.

Gambar. 10
Rapat Koordinasi Manajemen Risiko



IKU.11. Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.

Nilai LAKIP Inspektorat berdasarkan penilaian Tim Evaluasi SAKIP BKN berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat BKN Nomor 046/AI.03/LHE/H/2023 tanggal 4 September 2023, memperoleh nilai sebesar **69,25** (enam puluh sembilan koma dua puluh lima) dengan kategori B. Hasil penilaian tersebut diartikan **Baik**, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai : 22,80
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai ; 20,40
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai ; 10,05
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai : 16,00

Adapun rekomendasi dari Tim Evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Agar Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja pada website BKN;
2. Agar melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras;
3. Agar menetapkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (achievable);
4. Agar menyusun rencana aksi yang sesuai dengan:
 - a. Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kinerjanya;
 - b. Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/ penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan.
5. Agar melakukan Perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan, dan mencantumkan penjelasan penyebab adanya perubahan target yang berbeda antara Dokumen Perencanaan Kinerja dengan dokumen di Renstra;
6. Agar melakukan perbaikan atas Dokumen Manual IKU terkait Formulasi perhitungan IKU dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
7. Agar berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan organisasi untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
8. Agar penyajian informasi terkait Analisis Efisiensi atas Sumber Daya pada Laporan Kinerja;
9. Agar menyajikan informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah selama masa periode Renstra pada Laporan Kinerja;

10. Agar menyajikan informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja;
11. Agar mencantumkan informasi kualitas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada laporan kinerja;
12. Agar mencantumkan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada laporan kinerja;
13. Agar menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan analisa yang mendalam sesuai dengan Pedoman Manajemen Kinerja Organisasi di Lingkungan BKN;
14. Agar melakukan tindak lanjut di tahun berjalan sesuai dengan rekomendasi atas hasil evaluasi.

Dari rekomendasi Tim Evaluasi tersebut, Inspektorat telah melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya adalah:

1. Dokumen perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja akan kami publikasikan pada website BKN;
2. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja sudah selaras;
3. Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja telah mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya ;
4. Penyusunan rencana aksi sudah sesuai dengan:
 - a. Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kinerjanya.
 - b. Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/ penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan.
5. Telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan, dan mencantumkan penjelasan penyebab adanya perubahan target yang

- berbeda antara Dokumen Perencanaan Kinerja dengan dokumen di Renstra;
6. Dokumen Manual IKU terkait Formulasi perhitungan IKU sudah mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
 7. Data/ laporan kinerja dari setiap IKU dapat diakses melalui Link [https://bit.ly/Realisasi IKU 2023](https://bit.ly/Realisasi_IKU_2023) bagi pihak yang berkepentingan;
 8. Sudah menyajikan informasi terkait Analisis Efisiensi atas Sumber Daya pada Laporan Kinerja;
 9. Sudah menyajikan informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah selama masa periode Renstra pada Laporan Kinerja;
 10. Sudah menyajikan informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja berupa tabel perbandingan target dan realisasi dari tahun 2020-2023;
 11. Sudah mencantumkan informasi kualitas keberhasilan/ kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada laporan kinerja;
 12. Sudah mencantumkan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada laporan kinerja;
 13. Sudah menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan analisa yang mendalam sesuai dengan Pedoman Manajemen Kinerja Organisasi di Lingkungan BKN;
 14. Sudah melakukan tindak lanjut di tahun berjalan sesuai dengan rekomendasi atas hasil evaluasi.

3.8 Sasaran Strategis 7 : Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

IKU.12. Nilai Realisasi Kinerja Anggaran Inspektorat.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat, cetakan ke-5 Tanggal 20 November 2023 bahwa pagu Inspektorat adalah sebesar **Rp. 967.776.000,-**

Pagu Anggaran Inspektorat awalnya sebesar Rp. 813.184.000,- berdasarkan hasil rapat evaluasi internal, Inspektorat membutuhkan anggaran perjalanan dinas pengawasan (audit), setelah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi maka anggaran Inspektorat mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp.120.635.000,-** sehingga anggaran inspektorat menjadi **Rp.967.776.000,-**

Tabel . 24

Target dan Realisasi Bulanan Anggaran Inspektorat

No	Bulan	Target (dalam rupiah)	Realisasi per Bulan (dalam rupiah)	Realisasi akumulatif (dalam rupiah)
1.	JANUARI	10.000.000	0	0
2.	PEBRUARI	15.000.000	11,517.600	11.517.600
3	MARET	145.000.000	178.692.952	190.210.552
4	APRIL	25.000.000	22.502.280	212.712.832
5	MEI	16.000.000	15.951.120	228.663.952
6	JUNI	55.000.000	54.428.578	283.092.530
7	JULI	15.000.000	12.566.969	295.659.499
8	AGUSTUS	20.000.000	19.499.677	315.159.176
9	SEPTEMBER	120.000.000	115.712.960	430.872.136
10	OKTOBER	72.000.000	72.706.497	503.578.633
11.	NOVEMBER	200.000.000	211.313.627	714.892.260
12	DESEMBER	284.776.000	236.334.296	951.226.556

Adapun rincian Realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel. 25
Realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2023

Kode	Program kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp	Sisa	%
WA	Program Dukungan Manajemen				
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal.	967.776.000	951.226.556	16.549.444	98,29 %
052.OA	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi	6.408.000	6.407.050	950	99,99 %
052.OB	Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	1.275.000	1.275.000	0	100 %
052.OC	Reviu Laporan Keuangan	1.892.000	1.889.500	2.500	99,87 %
052.OD	Bimbingan Teknis SPIP	10.800.000	10.800.000	0	100 %
052.OE	Rapat Koordinasi	36.333.000	36.331.500	1.500	100 %
052.OF	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	527.155.000	523.717.669	3.437.331	99,35 %
052.OG	In House Training Kapabilitas Audit Internal	58.500.000	58.500.000	0	100 %
052.OI	Penerapan Manajemen Risiko.	16.318.000	16.318.000	0	100 %
052.OK	Rapat Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Temuan BPK/BPKP/Inspektorat	288.166.000	275.059.337	13.106.663	95,41 %
052.OM	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	17.329.000	17.328.500	500	100 %

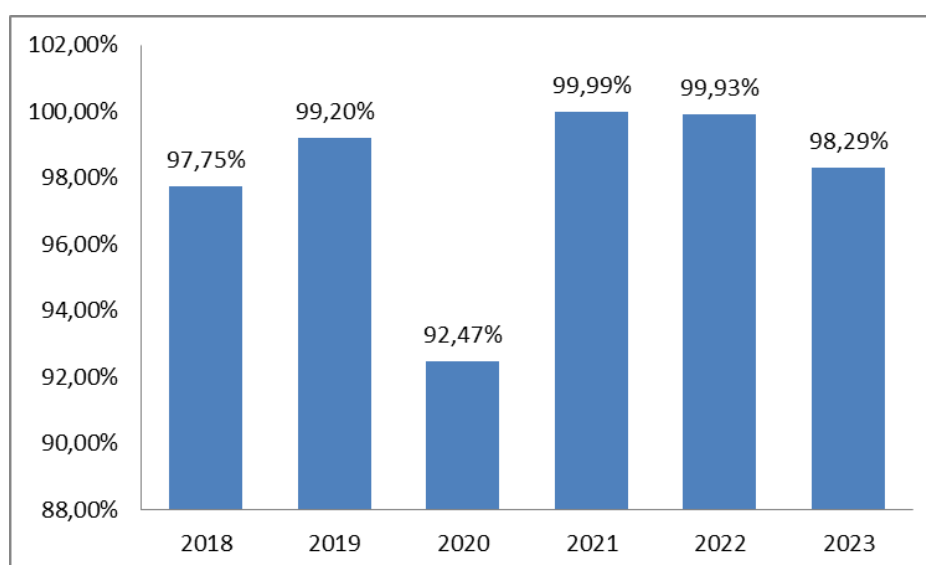
Kode	Program kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp	Sisa	%
052.ON	Sharing Session Aplikasi Pengawasan	3.600.000	3.600.000	0	100 %

Realisasi Penggunaan Anggaran dari Pagu sebesar **Rp. 967.776.000,-** terealisasi **Rp 951.226.556,-** dengan persentase **98,29%**. Sisa anggaran sebesar **Rp 16.549.444,-** secara garis besar seluruh anggaran dapat terserap sesuai dengan pagu anggaran.

Tabel. 26
Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023

Tahun	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
2018	1.836.832.000	1.795.581.586	41.241.414	97,75 %
2019	1.809.283.000	1.794.777.542	14.505.458	99,20 %
2020	1.223.737.000	1.131.613.968	92.123.032	92,47 %
2021	723.951.000	723.892.076	58.924	99,99 %
2022	847.141.000	846.565.070	575.930	99,93 %
2023	967.776.000	951.226.556	16.549.444	98,29%

Grafik. 6
Persentase Realisasi Anggaran



Terjadi penurunan dalam realisasi anggaran Inspektorat dimana tahun 2022 persentase realisasi anggaran 99,93%

menjadi 98,29% pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 1,64% dikarenakan pada pertengahan tahun 2023, BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja atas BKN. Kegiatan ini belum direncanakan di awal tahun sehingga Inspektorat harus mengajukan penambahan anggaran sebesar **Rp.120.635.000,-** untuk kegiatan pendampingan pemeriksaan. Setelah anggaran bertambah, BPK menginformasikan bahwa pelaksanaan audit berbeda dengan audit konvensional sehingga tidak memerlukan adanya pendampingan dari APIP instansi. Dengan demikian anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan BPK. Inspektorat memanfaatkan anggaran tersebut untuk kegiatan pengawasan lain di antaranya pemantauan pelaksanaan Seleksi CASN di akhir tahun 2023. Meski demikian, tetap terdapat sisa anggaran dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Sisa anggaran tersebut tidak mempengaruhi kualitas capaian kinerja Inspektorat selama tahun 2023.

IKU.13. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat.

Adapun Laporan tindak lanjut temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat terhadap unit Inspektorat Tahun 2023 tidak ada temuan. Meskipun terjadi penurunan dalam realisasi anggaran Inspektorat dimana tahun 2022 persentase realisasi anggaran 99,93% menjadi 98,29% pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 1,64%.

Tabel. 27
Tindak lanjut temuan Tahun 2021-2023

Tahun	Pagu	Persentase	Temuan Pemeriksaan
2021	723.951.000	99,99 %	0
2022	847.141.000	99,93 %	0
2023	967.776.000	98,29%	0

BAB. IV

PENUTUP

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam upayanya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran utama yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Inspektorat BKN ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping juga dapat dipergunakan sebagai alat pengendali manajemen yang handal untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat BKN.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam evaluasi dan analisis kinerja organisasi. Namun demikian berangkat dari kelemahan dan kekurangan tersebut merupakan tantangan bagi Inspektorat BKN untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini di masa-masa yang akan datang. Pada bab penutup ini akan diambil kesimpulan yang berisi perumusan secara garis besar mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam pembahasan laporan ini. Disamping itu dalam penutup ini juga akan disampaikan saran atau rekomendasi yang merupakan langkah tindak yang bersifat konkret dalam pemecahan permasalahan yang menghambat kinerja Inspektorat BKN dalam mencapai sasaran utama yang telah ditetapkan.

4.1. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada uraian dan pembahasan yang dilakukan dalam LAKIP Inspektorat BKN, maka pada garis besarnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mencapai visi dan misinya Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan internal melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan terhadap kinerja dan laporan keuangan di lingkungan BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.
2. Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP terus ditingkatkan sehingga mendukung Reformasi Birokrasi komponen Penguatan Pengawasan.
3. Telah diterbitkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun 2023 dengan persentase pencapaian sebesar 93%.
4. Penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 951.226.556,- dari pagu sebesar Rp 967.776.000,- atau dengan persentase sebesar 98,29%.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara telah sesuai dengan kode etik dan standar Audit yang berdasarkan pada peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

4.2. Rekomendasi/Masukan

Dalam upaya mempertahankan dan menyempurnakan kinerja yang telah dicapai, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat BKN ini, maka perlu untuk dilakukan langkah kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan secara diskusi bersama untuk menentukan skala prioritas unit yang diaudit berdasarkan analisis mitigasi risiko.

2. Faktor kunci peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan tugas pokok inspektorat melalui peningkatan kompetensi, maka agar dapat dialokasikan anggaran untuk workshop, pelatihan, pengiriman diklat bagi auditor.

Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja 2023;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan 2023;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2023.